

Demonstrasi Tolak Calon Gubernur Meksiko Berujung Bentrok

MEXICO CITY(IM)- Dua kelompok pengunjuk rasa di selatan Kota Iguala, Meksiko bentrok. Insiden itu terjadi saat kemarahan atas dukungan Presiden Andres Manuel Lopez Obrador pada kandidat calon gubernur yang dituduh melakukan pemerkosaan semakin memanas.

Dalam sebuah video yang dibagikan di media sosial terlihat seorang perempuan dipukul dengan megaphone oleh pengunjuk rasa perempuan lainnya. Wajah korban merah dengan darah. Bentrokan terjadi menjelang Lopez Obrador bertemu dengan Presiden Argentina Alberto Fernandez.

Beberapa pekan terakhir banyak pihak yang meminta

presiden untuk mencabut dukungannya pada Salgado yang dituduh melakukan pemerkosaan. Pada awal bulan ini, kelompok anggota parlemen perempuan, anggota partai dan pendukung MORENA meminta pemertimbangan kembali pencalonan Salgado.

Lopez Obrador mengatakan seruan tersebut bermotif politik. Pemungutan suara di Guerrero salah satu dari serangkaian pemilihan yang digelar bulan Juni yang akan menentukan apakah MORENA dan sekutu-sekutunya dapat mempertahankan kekuasaan mereka di Kongres. ● **gul**

Venezuela Usir Delegasi Uni Eropa

CARACAS(IM) - Venezuela mengusir Kepala Delegasi Uni Eropa, Isabel Brilhante sebagai tanggapan atas sanksi baru yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Dalam siaran televisi nasional, Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza mengatakan, Brilhante memiliki waktu 72 jam untuk meninggalkan Caracas.

"Hari ini, atas keputusan Presiden Nicolas Maduro, kami telah menyampaikan kepada Isabel Brilhante yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi ketua delegasi Uni Eropa di Venezuela, sebuah deklarasi sebagai 'person non-grata'," ujar Arreaza, dilansir Aljazeera, Kamis (25/2).

Pada Senin (22/2), Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada 19 pejabat Venezuela yang dituduhnya "merongrong hak pemilihan oposisi" dan "pelanggaran serius hak asasi manusia" di negara itu. Sanksi itu terdiri dari pembekuan aset dan larangan perjalanan. Sanksi ini dijatuhkan setelah Maduro memenangkan pemilihan legislatif pada Desember. Oposisi Venezuela menyatakan ada kecurangan dalam pemilihan legislatif tersebut. Uni Eropa mengatakan, sanksi itu dapat diubah dan tidak dimaksudkan untuk memberikan efek kemanusiaan.

"Langkah-langkah yang ditargetkan ini dirancang untuk tidak memiliki efek kema-

nusiaan yang merugikan atau konsekuensi yang tidak diinginkan bagi penduduk Venezuela, dan dapat dibatalkan," kata dewan Uni Eropa dalam sebuah pernyataan.

Uni Eropa menyalskan keputusan Venezuela yang mengusir kepala delegasi Uni Eropa. Langkah tersebut merusak upaya Uni Eropa untuk mendukung negosiasi dan dialog di negara yang dilanda krisis itu.

"UE sangat menyalskan keputusan otoritas Venezuela yang menyatakan Kepala Delegasi UE di negara itu sebagai persona nongrata. Ini hanya akan mengarah pada isolasi internasional lebih lanjut di Venezuela. Kami menyerukan agar keputusan ini dibatalkan," ujar juru bicara UE untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nabila Massrali.

Pemimpin oposisi Juan Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela pada 2019, dan memboikot pemilihan legislatif. Di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, AS mengukui Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela. Uni Eropa pada awal Januari mencabut pengakuannya atas Guaido sebagai presiden sementara setelah pemungutan suara. Hal itu menyebabkan Guaido kehilangan posisinya sebagai ketua Majelis Nasional. ● **ans**



PERTEMUAN MENLU VENEZUELA DAN DUBES UNI EROPA

Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza berbicara dengan duta besar Uni Eropa untuk Venezuela Isabel Brilhante Pedrosa, selama pertemuan di kantor pusat Kementerian Luar Negeri di Caracas, Venezuela, Rabu (24/2).

Korut Jadikan Tawanan Perang Korsel dan Keturunannya Budak di Tambang Batubara

Sebuah laporan kelompok hak asasi manusia menyatakan Korut menjadikan tawanan perang Korsel dan keturunannya sebagai budak di tambang batubara.

SEOUL(IM) - Korea Utara (Korut) menggunakan tahanan perang Korea Selatan (Korsel) dan keturunannya selama beberapa generasi sebagai budak di jaringan tambang batubara. Demikian laporan yang dirilis oleh kelompok hak asasi manusia.

Puluhan ribu tahanan perang Korsel tidak pernah dikembalikan oleh Pyongyang setelah perang Korea 1950-53.

"Sebaliknya, mereka ditugaskan untuk bekerja keras di tambang batubara dalam kondisi seperti budak, dengan anak-anak dan cucu-cucu

mereka mewarisi nasib brutal," menurut aliansi warga negara untuk Hak Asasi Manusia Korea Utara (NKHR) yang berbasis di Seoul, Korsel.

Korut menggunakan apa yang disebut sebagai "Songbun", sebuah sistem yang mengklasifikasikan warga negara sesuai dengan latar belakang sosial-politik mereka, dari setia yang menjadi "inti" hingga "netral" dan "bermusuhan".

"Songbun ini telah diturunkan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka yang terikat dengan tenaga batubara, timah,

seng, magnetit dan tambang lainnya," bunyi laporan itu.

"Mereka benar-benar dibatasi dari mengubah tempat tinggal, pekerjaan, atau mencapai pendidikan tinggi," sambung laporan itu seperti dikutip dari France24, Kamis (25/2).

Pyongyang menginvasi Korsel pada tahun 1950 dan pada saat gencatan senjata ditandatangani, ratusan ribu tentara yang ditangkap ditahan di kedua sisi DMZ.

Sementara Konvensi Jenewa mensyaratkan semua tawanan untuk dipulangkan begitu permusuhan berakhir, Pyongyang hanya mengembalikan 8.343 ke Korsel.

Laporan hak asasi manusia PBB pada tahun 2014 menyimpulkan bahwa setidaknya 50.000 tawanan dari Korsel tetap berada di Korut setelah perang, dan bahwa sekitar 500 masih hidup.

"Tetapi keadaan mereka diabaikan oleh pemerintah Seoul," penulis laporan NKHR, ujar Joanna Hosaniak kepada AFP.

Menurut Hosaniak pemerintah Korsel tidak menunjukkan ketertarikan dan minatnya terhadap masalah ini.

"Kami tidak menaikkan masalah ini selama KTT dengan Korea Utara, karena tidak ada masalah hak asasi manusia yang diangkat selama pertemuan puncak, baik dengan Presiden Moon atau dengan Presiden Trump," ujarnya.

Pyongyang, pada gilirannya, menegaskan melindungi hak asasi manusia dan menolak tuduhan pelanggaran oleh masyarakat internasional.

Negara tertutup ini menyatakan bahwa semua tawanan dikembalikan sesuai dengan istilah gencatan senjata, dengan seorang pejabat pemerintah yang sebelumnya mengatakan

bahwa siapa pun tetap bisa berada di "Republik penuh rahasia" keluar dari keinginannya.

Batubara adalah item ekspor teratas - sebagian besar ke Tiongkok - dan pendulang mata uang asing untuk Pyongyang, hingga ekspornya dilarang pada 2017 di bawah sanksi Dewan Keamanan PBB yang dikenakan atas senjata nuklir dan program rudal balistik.

Tetapi sebuah laporan tahunan kepada PBB oleh monitor independen tahun lalu mengatakan Korut mendapatkan ratusan juta dolar melalui ekspor batubara terlarang pada tahun 2019, yang secara historis berkontribusi untuk program rudal nuklir dan balistik negara itu.

Citra satelit juga menunjukkan produksi yang berkelanjutan di tambang batubara, kata penyelidik independen, meski negara itu menderita krisis energi parah. ● **tom**

Pertahankan Ark of the Covenant, 800 Orang Tewas

ADDIS ABABA(IM) - Sebanyak 800 orang dilaporkan tewas di Ethiopia saat para jamaah dan tentara mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi apa yang dikatakan umat Kristen sebagai Ark of the Covenant atau Tabut Perjanjian dari milisi lokal.

Umat Kristen Ethiopia mengklaim Ark of the Covenant - peti kayu yang dibuat

untuk menyimpan Sepuluh Perintah Musa - disimpan dengan aman di sebuah kapel di kota suci Axum di sebelah utara di wilayah Tigray.

The Sunday Times melaporkan pertempuran antara tentara Ethiopia dan pejuang pemberontak terjadi pada musim gugur, tetapi kejadian itu baru dilaporkan sekarang.

Ketika orang-orang mendengar tembakan itu, mereka

lari ke gereja untuk memberikan dukungan kepada para pendeta dan orang lain yang berada di sana melindungi Ark of the Covenant," ujar Getu Mak, seorang dosen universitas setempat, kepada The Times.

"Tentu saja beberapa dari mereka terbunuh karena melakukan hal itu," imbuhnya seperti dikutip dari New York Post, Kamis (25/2).

Sedikit yang diketahui tentang pengepungan mematikan sejak Tigray terputus dari dunia dan wartawan telah dilarang untuk memasuki wilayah tersebut.

Seorang diaken yang tinggal di Axum mengatakan kepada Associated Press bahwa dia membantu menghitung mayat korban, mengumpulkan kartu identitas korban dan membantu penguburan di kuburan massal.

Dia percaya bahwa diperkirakan 800 orang tewas di gereja dan di sekitar kota.

"Jika Anda menyerang Axum, pertama-tama Anda menyerang identitas Orthodox Tigrayans tetapi juga semua orang Kristen Ortodoks Ethiopia," kata Wolbert Smidt, seorang etnohistorian yang mengkhususkan diri di wilayah tersebut, kepada AP. ● **ans**



UNJUK RASA DI YUNANI

Seorang demonstran ditahan menyusul bentrokan selama demonstrasi dalam solidaritas dengan anggota kelompok militan 17 November yang dibubarkan, Dimitris Koufodinas, yang sedang mogok makan, di Athena, Yunani, Rabu (24/2).

PBB Desak Negara Teluk Tingkatkan Kontribusi di Yaman

NEW YORK(IM)- Kepala bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Mark Lowcock mendesak negara-negara Teluk untuk bertindak mencegah kelaparan skala besar di Yaman, dengan mengumpulkan 3,85 miliar dolar AS untuk operasi kemanusiaan di negara Semenanjung Arab. PBB menggambarkan Yaman sebagai negara yang dilanda krisis kemanusiaan terbesar di dunia dengan tingkat kelaparan mencapai 80 persen.

"Jika badan dunia tidak mendapatkan donasi yang dibutuhkan, maka yang akan kita lihat adalah kelaparan terburuk yang pernah terjadi di dunia selama beberapa dekade," ujar Lowcock.

Pada 2018 dan 2019, PBB dapat membantu musibah kelaparan yang dilanda oleh Yaman berkat bantuan sumbangan dari sejumlah pihak termasuk sumbangan besar dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Menurut Lowcock, saat ini terjadi penurunan besar dalam pemberian dukungan untuk membantu Yaman keluar dari bencana kelaparan.

"Apa yang mengkhawatirkan dan apa yang berbeda tentang situasi kita sekarang adalah bahwa ada penurunan besar dalam dukungan untuk operasi bantuan, sehingga kami telah memotong bantuan untuk orang-orang yang kelaparan," kata Lowcock.

Pada 2020, PBB hanya menerima dana sekitar separuh dari 3,4 miliar dolar AS dari total dana bantuan yang dibutuhkan. Lowcock mengatakan, menurunnya jumlah dana bantuan disebabkan oleh kontribusi dari negara-negara Teluk yang lebih kecil. Lowcock mendesak negara-negara Teluk untuk meningkatkan kontribusi pada 2021.

"Pesan saya benar-benar untuk negara-negara Teluk. Apakah Anda memiliki peran yang sangat penting untuk dimainkan di sini, apa yang Anda lakukan pada 2018 dan 2019 menyelamatkan banyak nyawa, dan memungkinkan kami untuk menghindari kehancuran total dan tragedi yang terjadi dalam sejarah," kata Lowcock.

"Ini adalah kelaparan yang sepenuhnya disebabkan oleh manusia," kata Lowcock menambahkan. Koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015, dan mendukung pasukan pemerintah yang memerangi kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran. Pejabat PBB mencoba menghidupkan kembali pembicaraan damai untuk mengakhiri perang, karena penderitaan Yaman semakin diperburuk oleh jatuhnya ekonomi dan mata uang serta pandemi Covid-19. Sekitar 80 persen penduduk Yaman bergantung pada bantuan internasional. ● **gul**

Jepang akan Hentikan Bantuan Pembangunan ke Myanmar

TOKYO(IM) - Surat kabar Jepang melaporkan Negeri Sakura menyelesaikan rencana untuk menahan bantuan baru ke Myanmar. Langkah itu diambil saat negara-negara Barat sudah memberlakukan sanksi dan mengancam mengambil langkah lebih lanjut pada militer Myanmar yang melakukan kudeta pada awal bulan ini.

Asahi Shimbun mengutip sejumlah sumber yang mengatakan pemerintah Jepang menahan diri untuk menyebut penangguhan bantuan Badan Bantuan Pembangunan (DOA) itu sebagai 'sanksi'. Surat kabar itu juga melaporkan Jepang akan membujuk junta militer Myanmar untuk meraih solusi demokrasi melalui dialog.

Ditanya mengenai laporan tersebut Kepala Kabinet Katsumoto Kato mengatakan tidak

ada yang benar mengenai laporan itu. Tapi, ia tetap membuka kemungkinan perubahan kebijakan bantuan pembangunan.

"Mengetahui bantuan ekonomi untuk Myanmar kami akan memantunya dengan hati-hati tanpa prasangka dan mempertimbangkan berbagai opsi," kata Kato dalam konferensi pers, Kamis (25/2).

Kantor berita Jepang, Kyodo News juga mengutip sejumlah sumber yang mengatakan pemerintah mempertimbangkan untuk menahan bantuan ke Myanmar. Jepang memiliki hubungan baik dengan Myanmar.

Negeri Sakura menahan diri untuk mengambil sikap tegas terhadap junta militer. Walaupun sekutu-sekutu dekatnya seperti Amerika Serikat (AS) sudah memberlakukan sanksi pada

militer Myanmar atas kudeta 1 Februari lalu.

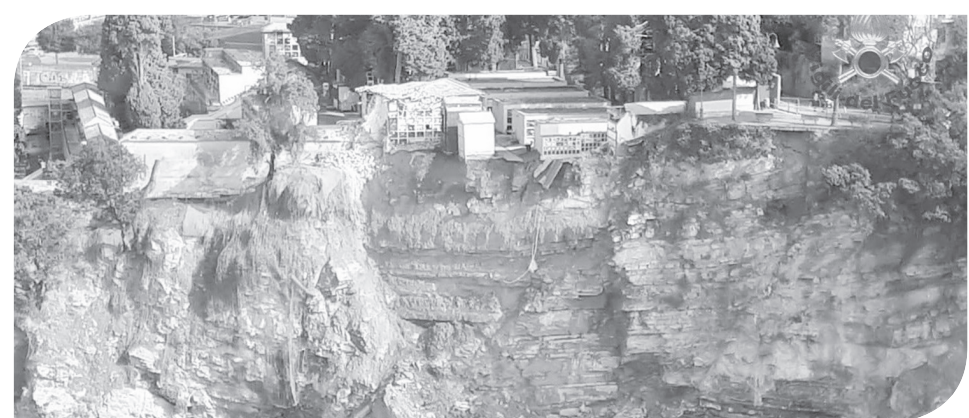
Tokyo salah satu pemberi dana hibah terbesar Myanmar. Dalam beberapa tahun terakhir perusahaan-perusahaan Negeri Sakura juga sangat agresif mengembangkan bisnis mereka di sana itu. Jepang juga khawatir bila hubungan mereka dengan Myanmar renggang negara Asia Tenggara itu dapat semakin mendekati ke Tiongkok.

Organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch dan Justice for Myanmar mengirimkan surat bersama ke Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi. Mereka mendesak Jepang menekan pemimpin-pemimpin kudeta untuk mengembalikan kekuasaan pada pemerintahan terpilih dan menghormati hak asasi manusia. ● **tom**



TANAH LONGSOR DI ITALIA

Pemandangan pemakaman Camogli setelah tanah longsor menghancurkan ratusan kuburan, di Camogli, Italia, Rabu (24/2).



TANAH LONGSOR DI ITALIA

Pemandangan pemakaman Camogli setelah tanah longsor menghancurkan ratusan kuburan, di Camogli, Italia, Rabu (24/2).

Netanyahu Desak Biden Tidak Cabut Sanksi untuk ICC

TEL AVIV(IM) - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk tidak mencabut sanksi terhadap Pengadilan Pidana Internasional (ICC). Netanyahu beralasan meskipun dia tidak setuju dengan mereka, AS dan Israel harus tetap bersatu.

Seperti dilaporkan oleh Axios, yang dinukil Russia Today, Kamis (25/2), Netanyahu secara pribadi menelpon Biden minggu lalu untuk meminta agar dia tetap menerapkan sanksi yang diberlakukan oleh mantan presiden Donald Trump itu. Sanksi dijatuhkan agar ICC tidak melancarkan penyelidikan kejahatan perang Tel Aviv di Gaza dan Tepi Barat.

Pada pejabat Israel berpendapat, kegagalan untuk mempertahankan sanksi tersebut dapat ditafsirkan oleh jaks ICC Fatou Bensouda sebagai tanda Washington tidak secara tegas menentang penyelidikan semacam itu. Israel tampaknya khawatir bahwa penyelidikan ICC akan menghasilkan surat perintah penangkapan internasional terhadap pejabat Israel dan personel militer.

Perkembangan seperti itu juga dapat menambah bahan bakar pada gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi, yang berupaya untuk memberikan tekanan ekonomi pada Israel dalam cara kampanye anti-apartheid melawan Afrika Selatan. Selain itu, Tel Aviv juga berpendapat hal itu bisa memberi lampu hijau pada langkah selanjutnya dalam penuntutan ICC atas dugaan kejahatan perang AS dengan.

Sebelumnya, Israel sangat bergantung pada sekutunya itu, dilaporkan meminta lusinan negara untuk menyampaikan pesan rahasia kepada Bensouda yang menasihatinya agar tidak

membuka penyelidikan kejahatan perang di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Duta besar Israel di seluruh dunia dikirim kabel rahasia awal bulan ini yang memerintahkan mereka untuk mulai melobi terhadap putusan tersebut, meminta pemerintah tuan rumah untuk mengeluarkan pernyataan oposisi publik terhadap keputusan hakim. Namun, hanya AS dan Australia yang melakukannya.

Para diplomat Israel juga diminta untuk memohon kepada tuan rumah mereka agar menekan Bensouda agar tidak melanjutkan penyelidikan.

"Anda diinstruksikan untuk memberi tahu tingkat tertinggi pemerintah bahwa jika penyelidikan terhadap Israel dimulai, itu akan menciptakan krisis berkelanjutan antara Israel dan Otoritas Palestina yang tidak akan memungkinkan kemajuan diplomatik terjadi di antara para pihak," bunyi kabel tersebut.

ICC bulan lalu memutuskan bahwa ia memiliki yurisdiksi di wilayah Palestina: Gaza dan Tepi Barat, meskipun Israel telah lama menyatakan klaim ilegal atas wilayah tersebut. ICC mencatat bahwa Israel bukanlah pihak dalam Statuta Roma yang menciptakan pengadilan internasional itu pada tahun 1998, sedangkan Palestina termasuk negara pihak.

Sementara AS mengukui klaim Israel atas pemukiman ilegal Tepi Barat tahun lalu, PBB tidak mengukui otoritasnya di sana sama seperti di Gaza atau Dataran Tinggi Golan.

ICC mulai menuntut Israel dan Hamas atas tuduhan kejahatan perang selama perang Israel di Gaza pada 2014 dan pembangunan pemukiman ilegal di Tepi Barat pada Desember 2019, yang langsung memicu penentangan AS. ● **gul**